**EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi**
**Vol.3, No.4, Mei 2024**

# Melihat Arah Kemiskinan Nias Utara dari Perspektif ADD, IPM serta PDRB

**Yatatema Zai[1], Martin Luter Purba[2], Nancy Nopeline[3]**
[1,2,3]Universitas HKBP Nommensen
E-mail: yatatema@student.uhn.ac.id[1], martinpurba@uhn.ac.id[2], nancynopeline@uhn.ac.id[3]

**Article History:**
Received: 06 Mei 2024
Revised: 28 Mei 2024
Accepted: 30 Mei 2024

**Keywords:** *Poverty, Village Fund Allocation, Human Development Index, Gross Regional Domestic Product*

***Abstract:*** *This study aims to analyze the causality of poverty in North Nias with the allocation of village funds, human development index and gross regional domestic product. The research method used is to use the Granger Causality Test. The data used is secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics which consists of data on the number of poor people in North Nias in 2010-2023, the allocation of village funds in North Nias in 2010-2023, the Human Development Index of North Nias in 2010-2023 and the Gross Regional Domestic Product of North Nias in 2010-2023. This research was processed using Eviews version 10, but before processing, interpolation was carried out first to extend the research year due to data limitations. The results show that there is a causal relationship between poverty and ADD, there is no causal relationship between poverty and human development index, and there is no causal relationship between poverty and gross regional domestic product.*

## PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan integral dari pembangunan nasional. Tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan memberikan kehidupan yang layak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui proses pembangunan di setiap daerah, akan berpotensi terhadap peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi ini mencerminkan perkembangan aktivitas ekonomi yang menghasilkan peningkatan produksi barang dan jasa dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengatasi kemiskinan yang ada di daerah merupakan salah satu tujuan pembangunan dan menjadi fokus di negara manapun dalam mengatasinya. Karena tanpa adanya perhatian yang serius, maka masalah tingkat kemiskinan membuat proses pembangunan dan transformasi banyak mengalami hambatan dengan timbulnya konflik sosial ekonomi di lingkungan masyarakat. Oleh karenanya, pengentasan kemiskinan ini sampai menjadi fokus utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam program Sustainable Development Goals (SDG's) periode 2015-2030, yang melibatkan partisipasi banyak anggota negara, termasuk Indonesia.

WHO (1948) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti pangan, air bersih, perumahan, dan layanan kesehatan. Seperti

**EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi**
**Vol.3, No.4, Mei 2024**

halnya WHO, World Bank (1990) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, sehingga membatasi kemampuan seseorang untuk mencapai potensi penuh mereka (BPS 2023).

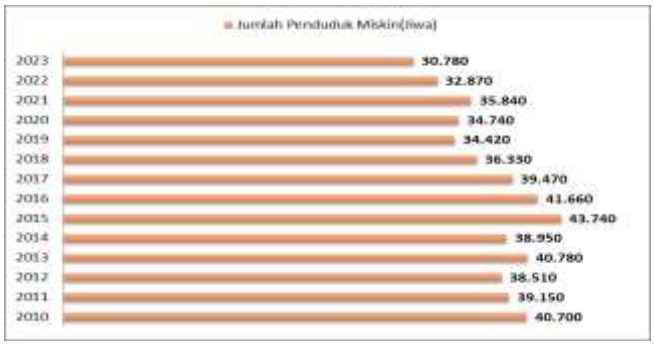
Kuncoro dalam penelitian Itang (2015) menyatakan:

*"Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitas nya rendah. Selanjutnya, kemiskinan juga muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia yang rendah yang berarti produktivitas juga rendah dan upahnya pun rendah, terakhir ia menjelaskan bahwa kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal. Akibat keterbatasan (bahkan tidak ada) pilihan untuk mengembangkan hidupnya, kecuali menjalankan apa yang dapat dilakukan (bukan apa yang seharusnya dilakukan".*

Dalam hal penanggulangaan kemiskinan, daerah 3T (Tertinggal, Terluar dan Terdepan) menjadi lokasi penanganan kemiskinan ekstrim oleh Pemerintah untuk mendorong masyarakat hidup mandiri secara ekonomi. Hal ini sesuai instruksi yang di sampaikan Pemerintah dimana Pemerintah memerintahkan kepada para Kepala Sentra untuk memetakan potensi apa di daerah-daerah yang dianggap miskin itu, sehingga bisa di lakukan untuk perbaikan ekonominya (Anonim, 2023). Hal ini berarti, perlu perhatian khusus kepada daerah 3T untuk dapat mengatasi tantangan sebagai wilayah 3T.

Pemerintah menetapkan ada 62 daerah di Indonesia yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal tahun 2020-2024. Dari 62 daerah tersebut, ada 4 daerah di Provinsi Sumatera Utara yang tergolong ke dalam daerah 3T, dan satu diantaranya adalah Kabupaten Nias Utara (Prasetia A, 2020). Ada 6 kriteria terkait penetapan daerah 3T berdasarkan Perpres, yakni : (a) perekonomian masyarakat; (b) sumber daya manusia; (c) sarana dan prasarana; (d) kemampuan keuangan daerah; (e) aksesibilitas; dan (g) karakteristik daerah

Nias Utara sebagai salah satu dari 33 kabupaten di Sumatera Utara yang tergolong muda dan merupakan salah satu kabupaten yang memiliki jumlah desa terbanyak dari 11 kecamatan yang ada. Dan, tidak dapat dipungkiri bahwa Nias Utara menjadi peringkat kedua sebagai kabupaten termiskin di provinsi Sumatera Utara. Perkembangan jumlah kemiskinan di Kabupaten Nias Utara dapat dilihat dalam gambar 1.




**Gambar 1. Perkembangan Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Nias Utara 2010-2023**
**Sumber:** Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (2023), Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten Kota (diolah)

Gambar diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Nias Utara cenderung menurun sepanjang tahun 2010-2023. Jumlah penduduk miskin Nias Utara pada tahun 2015 adalah

EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.3, No.4, Mei 2024

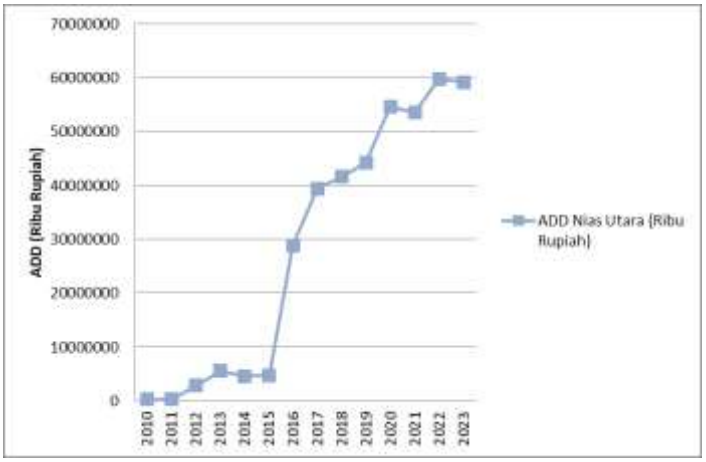
jumlah penduduk miskin tertinggi dari periode yang ada yakni berjumlah 43.740 jiwa. Namun di tahun 2016 jumlah kemiskinan turun menjadi 41.660 jiwa sampai ditahun 2019 terus turun dengan jumlah kemiskinan 34.420 jiwa. Meskipun kembali naik di tahun 2019-2022, namun di tahun 2022, penduduk miskin kembali turun sebanyak 32.870 jiwa. Meskipun penurunannya cukup baik namun hal ini masih menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di kabupaten Nias Utara masih cukup tinggi dimana jumlah populasi penduduk Nias Utara pada tahun 2022 yaitu sejumlah 150.780 orang. Artinya, Kabupaten Nias Utara juga masih hidup dalam kemiskinan.

Salah satu kriteria penetapan daerah 3T dalam hal ini Kabupaten Nias Utara yang perlu disorot adalah bagaimana kemampuan keuangan suatu daerah serta bagaimana pemanfaatan dan pengalokasian keuangan daerah tersebut. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi (Kemendes PDT), menegaskan kepada seluruh desa di Indonesia untuk menggunakan dana desa secara tepat sasaran serta sesuai kebutuhan agar dapat mengembangkan potensi yang ada di desa sehingga alokasi dana desa yang sesuai menjadi sebuah kegiatan ekonomi atau usaha produktif yang memajukan dan mensejahterakan desa (Mandra, 2023).

Rohaeni, (2015) berpendapat bahwa:

*"Salah satu cara yang banyak digunakan oleh pemerintah negara dimanapun dalam mengatasi kemiskinan di negaranya adalah dengan memberikan perhatian khusus dalam upaya menanggulangi masalah kemiskinan yaitu dengan mengalokasikan sejumlah dana pada pospos yang dapat digunakan sebagai dana untuk membiayai program atau kebijakan yang dapat menanggulangi masalah kemiskinan tersebut".*

Sebagai bagian dari upaya dalam mengatasi kemiskinan, saat ini pemerintah melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Salah satu langkah konkrit dalam menangani masalah kemiskinan adalah melalui Alokasi Dana Desa (ADD), dimana salah satu tujuannya adalah mengurangi tingkat kemiskinan. Dalam konteks ini, bentuknya berupa pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; serta pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan.




**Gambar 2. Perkembangan Alokasi Dana Desa Kabupaten Nias Utara Tahun 2010-2022**

**Sumber:** Badan Pusat Statistik Indonesia, Statistik Keuangan Pemerintahan Desa 2010-2023 (diolah)

Gambar 2 menunjukkan bahwa Jumlah ADD Nias Utara untuk 5 tahun terakhir jika dibandingkan pada tahun 2012-2015 memiliki perbedaan yang cukup jauh. Tahun 2016 ADD Nias

Utara meningkat pesat dibanding tahun 2015, hal ini dikarenakan adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat yang meningkatkan anggaran Desa sebagai bagian dari kebijakan pembangunan daerah dan pemberdayan masyarakat Desa. Hal ini sesuai dengan Kajian Analisis Ringkas Cepat oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI, yang menyatakan bahwa ADD dianggarkan dalam jumlah yang cukup besar untuk diberikan ke setiap desa. Besaran ADD Nasional setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan dimana pada tahun 2015, ADD Nasional hanya sebesar Rp20,7 triliun dengan rata-rata setiap desa menerima alokasi Dana Desa Nasional sebesar Rp280 juta. Jauh meningkat ketika dibandingkan dengan tahun 2016 dimana ADD Nasional sebesar 46.98 triliun rupiah. Ketika kembali ke gambar 1 bahwa di tahun yang sama yakni 2012-2015 alokasi dana desa Nias Utara mengikuti jumlah penduduk miskin di Nias Utara di tahun itu. Namun, di tahun 2016-2020 ADD Nias Utara terus naik dan begitupun dengan kondisi kemiskinan yang terus turun. Namun, cukup berbeda di tahun 2020 dimana tahun yang tidak bisa diprediksi dengan hadirnya wabah Covid-19 di skala global dengan kondisi ADD Nias Utara yang terus naik, justru jumlah penduduk miskin di Nias Utara kembali naik, sampai dengan tahun 2021. Kemudian, ADD Nias Utara tahun 2022 kembali naik, namun kemiskinan di Nias Utara turun (tabel 1). Walaupun turun, namun masih terbilang sangat tinggi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Nias Utara tahun 2022 yakni sebanyak 150.780 Jiwa.

Gambar 2 juga menunjukkan bahwa tren peningkatan alokasi dana desa di Nias utara semakin meningkat dari tahun ke tahun dan melonjak tinggi jika dibandingkan pada tahun 2015 kebelakang. Dari grafik tersebut diharapkan bahwa adanya perbaikan yang terjadi di berbagai sektor yang membuat Nias utara semakin membaik dalam perekonomiannya dalam setiap desa. Walaupun pemerintah telah mengupayakan untuk meningkatkan serta mengupayakan pengelolaan ADD dengan sebaik mungkin untuk mengurangi tingkat kemiskinan, namun kenyataannya Nias Utara masih dihadapkan pada tingkat kemiskinan yang cukup tinggi.

Dalam hal faktor-faktor penyebab kemiskinan, menurut Kuncoro dalam peneltitian Itang (2015), bahwa salah satu faktor penyebab dari kemiskinan adalah sumber daya manusia. Itu artinya bahwa, kemiskinan terjadi ketika rendahnya kualitas daripada sumber daya manusia dalam suatu daerah tersebut. Salah satu tolak ukur kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilihat pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM yang mencerminkan tingkat pembangunan kualitas manusia, memainkan peran yang sangat krusial dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan. Pembangunan manusia secara menyeluruh, termasuk aspek mental, fisik, dan kecerdasan, menjadi dasar utama bagi kemajuan suatu bangsa menuju pembebasan dari kondisi kemiskinan. IPM, sebagai ukuran untuk kualitas pembangunan manusia, menjadi variabel yang sangat penting bagi suatu negara dalam upayanya untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Menurut BPS (2023) IPM didasarkan pada tiga dimensi utama yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. IPM memberikan informasi yang penting bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan kebijakan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan demikian, ada 4 komponen Indeks Pembangunan Manusia menurut BPS, diantaranya : (1) Umur Harapan Hidup; (2) Harapan Lama Sekolah; (3) Rata-rata Lama Sekolah; (4) Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Dalam rentang tahun 2010-2023, perkembangan nilai-nilai IPM dan komponennya di Kabupaten Nias Utara mencerminkan perjalanan pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat. IPM di Nias Utara tahun 2010-2023 dapat dilihat pada tabel 2.

Berdasarkan data pada tabel 2 menunjukkan bahwa Perkembangan IPM Kabupaten Nias Utara tahun 2012-2022 mengalami kemajuan dan hal ini seiring dengan empat aspek yang menjadi tolak ukur IPM di Nias Utara. IPM Kabupaten Nias Utara meningkat dari 57.87 di tahun 2012

menjadi 58.29 pada tahun 2013. Kemudian di tahun 2014 terus meningkat sampai dengan tahun 2017 menjadi 60.5. Hal ini dapat kita lihat dari kondisi UHH, dimana tahun 2015 UHH mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2013 yakni 68.59. Artinya bahwa bayi yang lahir di Kabupaten Nias Utara pada tahun 2015 diharapkan dapat bertahan hidup sampai usia 67 sampai 69 tahun. Hal yang sama dengan kondisi HLS dimana pada tahun 2015, HLS hanya mencapai 12.4 tahun, yang artinya harapan lama sekolah anak berusia 7 tahun di Nias Utara berkisar antara 10 sampai 12 tahun saja. Begitupun kondisi RLS, dimana RLS tahun 2015 adalah 6.06 tahun yang artinya masyarakat yang tinggal di Kabupaten Nias Utara yang usianya 25 tahun ke atas rata-rata telah mendapatkan pendidikan selama 6 tahun. Hal ini menjadi sebuah perhatian khusus ketika mengacu pada program pemerintah yang memberikan regulasi wajib belajar selama 9 tahun yang berlaku sejak 1994.

**Tabel 2. Indeks Pembangunan Manusia Nias Utara tahun 2010-2023**

| Tahun | UHH (Tahun) | HLS (Tahun) | RLS (Tahun) | Pengeluaran (Ribu Rupiah/ Tahun) | IPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 68.12 | 10.2 | 4.59 | 5236 | 54.72 |
| 2011 | 68.23 | 11.55 | 5.36 | 5411 | 57.53 |
| 2012 | 69.33 | 11.65 | 6.45 | 6125 | 57.87 |
| 2013 | 69.39 | 11.76 | 6.46 | 6159 | 58.29 |
| 2014 | 68.49 | 11.86 | 6.05 | 5580 | 59.18 |
| 2015 | 68.59 | 12.4 | 6.06 | 5627 | 59.88 |
| 2016 | 68.68 | 12.41 | 6.07 | 5770 | 60.23 |
| 2017 | 68.77 | 12.57 | 6.08 | 5835 | 60.57 |
| 2018 | 68.98 | 12.58 | 6.09 | 6041 | 61.08 |
| 2019 | 69.29 | 12.78 | 6.25 | 6245 | 61.98 |
| 2020 | 69.43 | 13.03 | 6.58 | 6064 | 62.36 |
| 2021 | 69.55 | 13.04 | 6.77 | 6155 | 62.82 |
| 2022 | 69.9 | 13.06 | 6.78 | 6575 | 63.75 |
| 2023 | 70,24 | 13.36 | 6.85 | 6788 | 64.64 |

**Sumber:** Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Utara Dalam Angka 2010-2023 (diolah)

Dan dapat dilihat berdasarkan data bahwa rata-rata masyarakat Nias Utara hanya bisa mencapai 6 tahun sekolah di tahun 2015 dengan pengeluaran per kapita yang mengikuti yakni sebesar Rp 5.627.000/tahun atau setara dengan Rp 468.916/bulan. Dan ketika melihat kembali kondisi kemiskinan pada gambar 1 bahwa jumlah penduduk miskin cukup besar dibanding tahun sebelumnya yakni sebesar 4.374.000 jiwa.

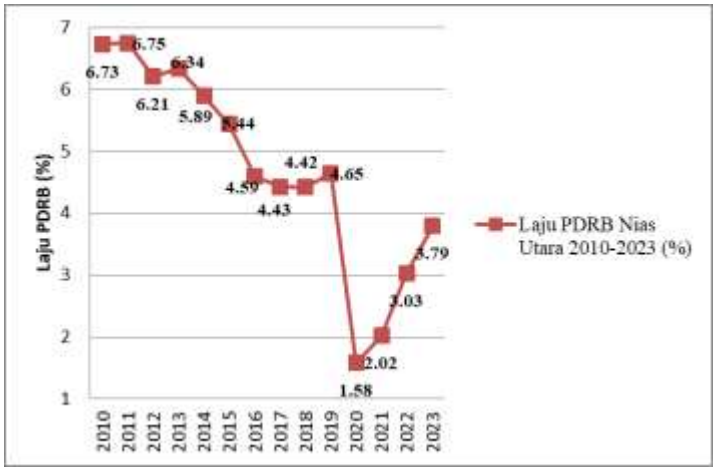
Tren peningkatan terus terjadi dimana mulai tahun 2017-2022 IPM Nias Utara terus mengalami perkembangan yang baik, hingga pada tahun 2022, IPM Nias Utara mencapai 63.75. Dimana UHH nya sebesar 69.9 tahun, HLS nya sebesar 13.06 tahun yang artinya Harapan Lama Sekolah anak berusia 7 tahun di Nias Utara mampu mencapai 13 tahun dan hal ini berarti diharapkan anak-anak yang usia 7 tahun sudah mampu menempuh pendidikan tingkat diploma. Kemudian RLS nya mencapai 6.78 tahun artinya masyarakat yang tinggal di Kabupaten Nias Utara

**EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi**
**Vol.3, No.4, Mei 2024**

yang usianya 25 tahun ke atas rata-rata telah mendapatkan pendidikan antara 6 sampai 7 tahun atau sudah mencapai pendidikan menengah pertama tingkat awal. Seiring berkembangnya waktu, Nias Utara perlahan sudah mampu untuk keluar dari tantangan dalam meningkatkan kualitas SDM, dimana terbukti di tahun 2022 masyarakat Nias Utara sudah bisa mencapai 13 tahun untuk menikmati dunia pendidikan dan sudah lebih dari baik ketika mengacu pada peraturan pemerintah yang baru yakni di UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas bahwa salah satu program prioritas nasional adalah menuntaskan wajib belajar selama 12 tahun. Dan melihat kondisi kemiskinan tahun 2022, dalam gambar 1 cukup menjelaskan bahwa tren peningkatan IPM memberikan efek yang cukup baik bagi jumlah penduduk miskin yang turun menjadi 3.287.000 Jiwa. Kemudian, ketika melihat pengeluaran per kapita yakni mencapai Rp 6.575.000/tahun atau setara dengan Rp 547.916 /bulan, dan jika dibandingkan dengan Rata-rata Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 yakni sebesar Rp 2.522.610, maka adanya perbedaan yang cukup jauh dan hal ini menjadi sebuah beban bagi pemerintah kabupaten untuk gencar dalam meningkatkannya.

Selain pembangunan manusia, keberhasilan perekonomian wilayah diukur melalui pertumbuhan ekonomi. Upaya pemerintah meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat (Khairul dalam Dondo, Benu dan Manginsela, 2019). Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau wilayah pada periode tertentu adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dalam pengentasan kemiskinan. Berdasarkan teori trickle down effect bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi akan menetes dari atas ke bawah, atau dalam arti tingkat kenaikan pendapatan rill akan mengalir dari kelompok golongan kaya ke kelompok golongan miskin. Pertumbuhan ekonomi akan lebih bermanfaat, apabila pertumbuhan itu bisa dinikmati oleh masing-masing kelompok masyarakat (Ardianto, T. 2012).




**Gambar 3. Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan Nias Utara Harga Konstan tahun 2010-2023**

**Sumber:** Badan Pusat Statistik Nias Utara, Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 2010-2023 (diolah)

Tren penurunan ini berlanjut hingga 2018, di mana laju pertumbuhan ekonomi mencapai 4.42%. Tahun 2019 mencatat peningkatan yang sedikit dengan laju pertumbuhan mencapai 4.65%.

Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan yang cukup tiggi menjadi 1.58%, hal ini dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang melanda sektor ekonomi global. Pada tahun 2021-2023, terlihat tanda-tanda pemulihan dengan laju pertumbuhan masing-masing sebesar 2.02% dan 3.79%. Tujuan yang paling penting dari suatu pembangunan adalah pengurangan tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

Nias Utara berada di urutan ketiga terendah setelah Nias Barat dari Pendapatan per kapita Kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Pendapatan perkapita yang rendah di kabupaten Nias Utara tentunya tidak terlepas dari berbagai rendahnya produktivitas di tiap-tiap sektor usaha mulai dari sektor pertanian, sektor manufaktur sampai kepada sektor jasa. Dan penyebab rendahnya pendapatan masyarakat di Nias utara adalah disebabkan oleh akses jalan atau infrastruktur yang sangat amat tidak layak untuk digunakan sebagai fasilitas untuk mendongkrak dan mendukung berbagai sektor dalam beroperasi. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli bahwa salah satu penyebab rendahnya pendapatan masyarakat adalah permasalahan infrastruktur yang belum memadai (Widyastuti, I., 2024).

Oleh karena itu, rendahnya pendapatan perkapita kabupaten Nias Utara menjadi salah satu alasan dilakukannya penelitian ini dengan tujuan untuk dapat mengetahui alasan mengapa pendapatan perkapita Nias Utara rendah dan bagaimana cara meningkatkannya kedepan. Dari uraian data diatas dapat kita lihat bahwa terjadinya fenomena dimana turun nya jumlah penduduk miskin tidak serta merta meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hal ini terlihat bahwa Kabupaten Nias Utara masih memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan grafik yang cukup baik. Dan relatif naikknya Indeks Pembangunan Manusia masih tidak berpengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Berdasarkan data diatas menunjukkan adanya fenomena menarik dimana Kemiskinan mengalami fluktuasi dari tahun 2012- 2022, tetapi ADD dan IPM selalu mengalami peningkatan meskipun peningkatan tersebut tidak terlalu tinggi.. Berdasarkan fenomena tersebut, maka dengan ini penulis tertarik untuk lebih lanjut melakukan penelitian dengan judul **"Melihat Arah Kemiskinan Nias Utara dari perspektif ADD, IPM serta PDRB"**.

## LANDASAN TEORI

### Kemiskinan

Kemiskinan adalah kelaparan. Kemiskinan adalah kurangnya tempat berlindung. Kemiskinan adalah sakit dan tidak bisa berobat ke dokter (Bank Dunia, 2005). Menurut Ghana Poverty Reduction Strategy (GPRS) (dalam Addae-Korankye, A. 2014), kemiskinan dikenal sebagai kemiskinan multidimensi dengan hubungan interaktif dan kausal yang kompleks antar dimensi.

Kuncoro mengatakan bahwa:

*"Secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kemiskinan juga muncul akibat perbedaan sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berdampak pada produktivitas rendah sehingga upahnya rendah" (Kristanto, 2014).*

Teori lingkaran setan kemiskinan, yang dibuat oleh Ragnar Nurkse pada tahun 1953, adalah salah satu teori kemiskinan yang paling terkenal. Teori tersebut mengemukakan bahwa kemiskinan tidak mempunyai ujung dan pangkalnya, yang mana semua unsur yang menyebabkan kemiskinan akan saling berhubungan. Sebuah produktivitas suatu wilayah yang rendah menyebabkan pendapatan masyarakat menurun. Pendapatan masyarakat yang rendah mengindikasikan bahwa

**EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi**
**Vol.3, No.4, Mei 2024**

pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah tidak berjalan positif.




**Gambar 4. Ilustrasi Lingkaran Kemiskinan Menurut Nurkse**
Sumber: Nurske (1953) dalam Kuncoro (2000)

Dalam teorinya tentang lingkaran setan kemiskinan, Nurkse berpendapat bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan masa lalu tetapi juga disebabkan oleh hambatan pembangunan di masa yang akan datang.

**Alokasi Dana Desa**

Menurut UU No. 6 Tahun 2014, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, ADD dimasukkan untuk tujuan berikut:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastuktur perdesaan.
4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Teori ekonomi mendefinisikan kebijakan fiskal sebagai kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan upaya (pengumpulan) pendapatan dan pengeluaran nasional (Mankiw, 2013). Kebijakan fiskal umumnya mewakili pilihan pemerintah dalam menentukan berapa banyak yang akan dibelanjakan dan berapa banyak pendapatan yang digunakan untuk mempengaruhi perekonomian. Berbagai opsi tersebut sebenarnya dilaksanakan melalui anggaran pemerintah provinsi yang ada yang dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan fiskal dapat

mendorong pertumbuhan ekonomi karena didorong oleh peningkatan produksi nasional yang didorong oleh pemerintah yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap peningkatan konsumsi masyarakat yang artinya terjadinya kesejahteraan dalam masyarakat.

Hukum Wagner *(Wagner's Law*) menyatakan bahwa peran dan belanja pemerintah *(government expenditure)* akan semakin meningkat seiring semakin bertumbuhnya perekonomian di suatu wilayah (Sukartin & Saleh, 2012). Hal ini dimaksud bahwa peran belanja transfer pemerintah pusat melalui ADD/Dana Desa semakin meningkat tiap tahunnya seiring bertumbuhnya perekonomian di desa dan dengan begitu dapat menekan tingkat kemiskinan di suatu daerah.

**Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang juga merupakan indikator yang menggambarkan perkembangan suatu pembangunan manusia secara terukur. IPM pertama kali diperkenalkan tepat pada tahun 1990 oleh United Nation Development Programme (UNDP).

Menurut UNDP, IPM memiliki tiga indikator pokok yang digunakan untuk mengukur implementasi status 16 pengembangan manusia melalui indikator sebagai berikut: (1) Umur panjang dan hidup sehat, indikator ini diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir. (2) Sistem pendidikan yang diukur melalui ratarata lama sekolah dan angka penduduk yang melek huruf (AMH) atau mengenyam pendidikan pada usia produktif 15 tahun keatas. (3) Selanjutnya standar hidup yang diukur dengan angka pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan menjadi prioritas daya beli, dalam IPM ini nilai indeks berada di kisaran antara 0-100 (Zain, 2022).

Adam Smith menganggap bahwa manusia sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya, alam 37 (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia (SDM) yang pandai mengolahnya sehinga bermanfaat bagi kehidupan. Adam Smith juga melihat bahwa alokasi SDM yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Alokasi SDM yang efektif merupakan syarat perlu (necessary condition) bagi pertumbuhan ekonomi.

Secara umum manfaat IPM adalah sebagai berikut:(1) Mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). (2) Menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. (3) Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) (BPS, 2022).

**Produk Domestik Regional Bruto**

PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. (BPS Nias Utara, 2022). Untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yakni: Pendekatan produksi, Pendekatan pendapatan dan Pendekatan pengeluaran. Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa .akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

Harrod Dommar membangun model pertumbuhan berdasarkan pada teori keseimbangan kegiatan perekonomian yang dikemukakan oleh Keynes. Keynes menyatakan bahwa pembelanjaan

agregat akan menentukan kegiatan tingkat kegiatan ekonomi, yaitu di dalam perekonomian terdapat konsumsi rumah tangga dan investasi perusahaan di mana kedua faktor tersebut menentukan tingkat pendapatan nasional. Harrod Domar kemudian menyatakan bahwa untuk memacu pertumbuhan ekonomi dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan neto terhadap cadangan atau stok modal. (Ginting, A.M dan Rasbin, 2010).

## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Metode Analisis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data ADD Nias Utara, IPM Nias Utara, PDRB atas dasar harga konstan Nias Utara serta Jumlah penduduk miskin Nias Utara dari tahun 2010-2023.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka metode analisis yang digunakan ialah menggunakan uji kausalitas. Dalam ilmu ekonometrika, uji kausalitas termasuk kedalam analisis regresi model dinamis karena memasukkan unsur lag didalam model dan biasanya penentuan hubungan antar variabel berdasarkan landasan teori atau kepustakaan (Gujarati, 2012). Adapun tahapan dalam pengujiannya adalah sebagai berikut:

1. Uji Stasioner (*Unir Root Test)*

   Uji Stasioneritas merupakan pengujian untuk mengetahui data yang diolah tidak dipengaruhi oleh waktu atau bergerak tidak stabil. Data time series dapat dinilai stasioner ketika data yang diolah bergerak stabil tanpa mengalami gejolak kepada tren ke arah negatif maupun positif (Gujarati, 1995). Apabila data yang akan diteliti belum stasioner maka harus dilakukan second difference dan seterusnya sampai data dinyatakan stasioner (Ajija, 2011). Jika di dalam pengujian tersebut ternyata data sudah stasioner, maka pengujian dapat dilanjutkan ke *Granger Causality test* pada data asli. Tapi jika salah satu variabel ada yang tidak stasioner, maka akan dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah kedua variabel terkointegrasi atau tidak. Jika kedua variabel terkointegrasi, maka dapat langsung dilakukan Granger Causality test pada data asli.

   Ketentuan uji ADF:

   • Jika nilai ADF stat < Nilai MacKinnon Critical : H0 diterima (Nonstasioner)
   • Jika Nilai ADF stat > Nilai MacKinnon Critical : HA diterima (Stasioner)

2. Uji Kointegrasi *(Cointegration Test)*

   Uji kointegrasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui adanya hubungan jangka panjang antar variabel. Pengujian kointegrasi dalam penelitian ini menggunakan metode Johansen's cointegration test. Pengujian kointegrasi perlu dilakukan untuk menghindari fenomena regresi palsu atau lancung dan sebagai pelengkap dari pengujian stasioneritas. Untuk menentukan data tersebut terkointegrasi atau tidak, dapat dilihat dengan membandingkan nilai trace-nya. Jika nilai trace lebih besar dari nilai kritis 5% maka data terkointegrasi dan mempunyai pengaruh jangka panjang.

   Proses pengujian sebagai berikut:

   Hipotesis :

   - H0= Tidak terdapat hubungan jangka panjang antara variabel independen dan variabel dependen.
   - H1 = Terdapat hubungan jangka panjang antara variabel independen dan variabel dependen.

   Kriteria :

• Jika nilai trace statistic > nilai critical value maka H0 ditolak
• Jika nilai trace statistic < nilai critical value maka H0 diterima

3. Penentuan Lag Optimal

Panjang kelambanan (*lag*) dikatakan optimal jika nilai-nilai pada kriteria tersebut memiliki nilai absolut paling kecil. Panjangnya kelambanan variabel yang optimal diperlukan untuk menangkap pengaruh dari setiap variabel yang lain dalam sistem VAR. Jika lag yang digunakan terlalu kecil maka kurang mampu untuk menjelaskan hubungan antar variabel dan sebaliknya. Dalam penelitian ini penentuan lag optimal dicari melalui *Schwarz Information Criterion* (SIC).

4. Uji Kausalitas Granger

Uji kausalitas granger adalah uji hipotesis statistik untuk menentukan apakah satu rangkaian waktu berguna dalam memperkirakan yang lain (Granger, 1969). Gujarati dan Porter (dalam Akbar, 2023) menyatakan kausalitas granger merupakan uji yang berfungsi menunjukkan hubungan kausalitas atau timbal balik antara dua variabel penelitian yang menghasilkan apakah kedua variabel tersebut secara statistik saling mempengaruhi (hubungan dua arah atau timbal balik), memiliki hubungan searah atau sama sekali tidak ada hubungan (tidak saling memengaruhi). Memastikan ada atau tidak variabel x dan y hubungan timbal balik.

Model persamaan kausalitas Granger dalam penelitian ini dapat diturunkan sebagai berikut:

$$ADDt = \sum_{i=1}^{n} \propto_1 ADDt\text{-}i + \sum_{i=1}^{n} \theta_1 POVt\text{-}i + \varepsilon_1$$

$$IPMt = \sum_{i=1}^{n} \delta_1 IPMt\text{-}i + \sum_{i=1}^{n} \xi_1 POVt\text{-}i + \varepsilon_1$$

$$PDRBt = \sum_{i=1}^{n} \beta_1 PDRBt\text{-}i + \sum_{i=1}^{n} \Phi_1 POVt\text{-}i + \varepsilon_1$$

Dimana:
ADD = Variabel Alokasi Dana Desa
IPM = Variabel Indeks Pembangunan Manusia
PDRB = Variabel Produk DOmestik Regional Bruto
POV = Variabel Kemiskinan
t = Seri waktu dari 1, 2, … n
ε = error term

Untuk melihat kausalitas granger dapat dilihat dengan membandingkan F-statistik dengan nilai kritis F-tabel pada tingkat kepercayaan (1%, 5% atau 10%) dan dapat diihat dari membandingkan nilai probabilitas dengan tingkat kepercayaan (1%, 5% atau 10%). Jika seluruh variabel memiliki nilai F-statistik lebih besar dari nilai F-tabel pada tingkat signifikan, maka kedua variabel tersebut memiliki kausalitas dua arah.

Kriteria penolakan dan penerimaan:
• F-Stat > F-Tabel = H0 ditolak
• F-Stat < F-Tabel = H0 diterima

a. H0 ditolak = Terdapat hubungan kausalitas antara ADD, IPM serta PDRB dengan Kemiskinan
b. H0 diterima = Tidak terdapat hubungan kausalitas antara ADD, IPM serta PDRB dengan Kemiskinan

**EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi**
**Vol.3, No.4, Mei 2024**

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum dilakukannya pengujian statisik, data yang digunakan dalam pengolahan atau pengujian stastistik ini adalah data hasil interpolasi. Hal ini didasarkan karena keterbatasan data asli yang dimiliki oleh Nias Utara, sehingga untuk menguji data, baik itu Uji stasioner, Kointegrasi, Lag dan sampai ke Uji Kausalitas, diperlukan interpolasi data dalam bentuk quartalan.

### Uji Stasioner

Untuk menguji stasioner data, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Augmented Dickey Fuller Test (ADF-Test), dengan taraf signifikansi 5%. Jika deret waktu tidak menunjukkan sifat stasioner setelah diambil selisih pertama (first difference), tetapi menjadi stasioner setelah diambil selisih kedua (second difference), itu menandakan bahwa tren atau pola dalam deret waktu tersebut mungkin bisa dihilangkan dengan melakukan perubahan selisih kedua.

**Tabel 3. Hasil uji stasioner dengan Uji ADF**

| Variabel | Tingkat | *t-statistik* | Probabilitas | Keputusan |
|---|---|---|---|---|
| ADD | Level | -0,918283 | 0,775 | Tidak Stasioner |
| | ***1st difference*** | **-3,599401** | **0.0089** | **Stasioner** |
| IPM | Level | -0,053825 | 0,9489 | Tidak Stasioner |
| | ***1st difference*** | **-4,763025** | **0,0003** | **Stasioner** |
| PDRB | Level | -1,596221 | 0,4776 | Tidak Stasioner |
| | ***1st difference*** | **-5,287315** | **0.0000** | **Stasioner** |
| Jumlah Penduduk Miskin | Level | -0,309647 | 0,9158 | Tidak Stasioner |
| | *1st difference* | -2,364478 | 0,1568 | Tidak Stasioner |
| | ***2nd difference*** | **-7,531671** | **0.0000** | **Stasioner** |

Berdasarkan Uji ADF diatas, bahwa data ADD, IPM, dan PDRB telah stasioner pada tingkat first difference artinya pada tingkat first difference sudah tidak terdapat akar unit pada critical value 5%, sedangkan variabel penduduk miskin stasioner di tingkat second difference. Karena data stasioner pada tingkat derajad yang tidak sama, maka akan dilanjutkan ke uji kointegrasi untuk melihat hubungan jangka panjang. Oleh karena itu, untuk melihat lebih lanjut bahwa apakah data stasioner, maka di lanjutkan dengan menggunakan uji kointegrasi.

### Uji Kointegrasi

Dalam penelitian ini, uji yang dipakai yakni Uji kointegrasi Johansen. Tujuan uji ini adalah untuk mengetahui apakah model regresi memiliki korelasi jangka panjang.

**Tabel 4. Hasil Uji Kointegrasi**

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

| Hypothesized No. of CE(s) | Eigenvalue | Trace Statistic | 0.05 Critical Value | Prob.** |
|---|---|---|---|---|
| None * | 0.432695 | 49.26939 | 47.85613 | 0.0366 |
| At most 1 | 0.196296 | 18.65905 | 29.79707 | 0.5176 |
| At most 2 | 0.114093 | 6.858705 | 15.49471 | 0.5941 |
| At most 3 | 0.005852 | 0.316940 | 3.841466 | 0.5735 |

Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Hasil uji trace statistic menunjukkan terdapat satu kointegrasi pada tingkat (α=5%) dimana nilai trace statistic sebesar 49.26939 lebih besar dari nilai critical value sebesar 47.85613 dan ditemukan bahwa nilai probabilitas menunjukkan 0.0366, yang artinya kurang dari α=5% atau sebesar 0.05. Persamaan kointegrasi ditemukan pada level 0,05 yang menunjukkan hubungan jangka panjang, seperti yang ditunjukkan oleh nilai Trace Statistic > Nilai Kritis. Karena semua data telah stasioner melalui uji kointegrasi maka akan di lanjutkan ke pengujian kausalitas granger.

**Penentuan Lag Optimal**

Dalam melakukan uji kausalitas granger, menemukan *lag* yang ideal sangat penting untuk dilakukan, yang menuntut durasi *lag* untuk digunakan. Hasil penentulan *lag* optimal dapat dilihat dalam tabel 5.

**Tabel 5. Penentuan *Lag* Optimal**

| Lag | LR | FPE | AIC | SIC | HQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NA | 2.67e+37 | 9.752.752 | 9.767.903 | 9.758.542 |
| 1 | 6.215.809 | 6.77e+31 | 8.464.234 | **85.39992*** | 8.493.184 |
| 2 | 5.096.469 | 3.82e+318* | 84.05635* | 8.541.999 | 84.57744* |
| 3 | 5.928.813 | 6.31e+31 | 8.452.778 | 8.649.748 | 8.528.046 |
| 4 | 4.216.084 | 1.11e+32 | 8.503.123 | 8.760.699 | 8.601.550 |
| 5 | 4.506.287 | 5.12e+31 | 8.415.658 | 8.733.841 | 8.537.245 |

Berdasarkan tabel 5 diatas menunjukkan bahwa lag yang sesuai berdasarkan nilai SIC terdapat pada lag 1 yaitu sebesar 85.39992, artinya kemiskinan akan mengalami perubahan jika hal tersebut akan mempengaruhi ADD, IPM dan PDRB pada 1 periode yang akan datang, (tahun yang akan datang), sebaliknya ketika ADD, IPM dan PDRB mengalami perubahan maka hal tersebut akan memengaruhi kemiskinan pada 1 periode yang akan datang (tahun yang akan datang).

Lag optimal terpilih adalah lag 1. Ini ditandai dengan tanda asterisk (*) pada SIC yang menunjukkan bahwa lag 1 memberikan nilai-nilai metrik yang terbaik. Jadi, hasil dari penentuan lag optimal ini adalah bahwa model yang memperhitungkan lag 1 adalah yang paling sesuai dengan data berdasarkan evaluasi menggunakan berbagai kriteria yang disebutkan di atas.

**Uji Kausalitas Granger**

Tujuan uji kausalitas granger adalah untuk mengetahui bagaimana variabel penelitian, apakah satu arah atau dua arah, dan atau berhubungan satu sama lain. (Rosadi, 2012). Hasil dari uji kausalitas ganger pada penelitian ini, dapat dilihat pada tabel 6.

**Tabel 6. Hasil Uji Kausalitas Granger**

| Null Hypothesis: | Obs | F-Statisisti | Prob. |
|---|---|---|---|
| ***ADD does not Granger Cause POV*** | **54** | **424.669** | **0.0199** |
| ***POV does not Granger Cause ADD*** | **54** | **341.946** | **0.0407** |
| *IPM Does not Granger Cause POV* | 54 | 264.687 | 0.0810 |
| *POV does not Granger Cause IPM* | 54 | 0.18337 | 0.8330 |

**EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi**
**Vol.3, No.4, Mei 2024**

Berdasarkan uji kausalitas granger diatas, menunjukkan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara ADD dengan Kemiskinan, namun tidak terdapat hubungan timbal balik antara IPM dengan Kemiskinan serta PDRB dengan Kemiskinan. Ketika nilai F-statistik lebih besar daripada F tabel, H0 ditolak, yang menunjukkan bahwa ada hubungan kausalitas antara ADD dan kemiskinan. Hal ini juga dapat dilihat dari nilai probabilitas yang lebih rendah dari nilai α = 5% atau 0.05, sehingga ketika nilai probabilitas lebih rendah dari 0.05, H0 ditolak, sehingga menunjukkan bahwa ada hubungan antar variabel atau bahwa satu variabel akan mempengaruhi variabel lainnya.

Keterangan: **F-stat = 4.24; F-tabel = 3.17**

Penjelasan dari uji kausalitas granger diatas, dapat dilihat sebagai berikut**:**

a. Hasil Uji Kausalitas Granger antara ADD dengan Kemiskinan

   Sesuai dengan hasil uji kausalitas yang dilakukan, menujukkan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara ADD dengan Kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas yang lebih kecil dari nilai α=5%. Dan juga Nilai F-stat > F-tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak yang berarti terdapat hubungan kausalitas.

b. Hasil Uji Kausalitas Granger antara IPM dengan Kemiskinan

   Berdasarkan hasil uji kausalitas, didapat bahwa IPM tidak memiliki hubungan satu arah maupun dua arah. Hal ini dapat dilihat darinilai probabilitas yang lebih besar dari nilai α=5%, juga dilihat pada nilai F-stat < F-Tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa antara IPM dengan Kemiskinan tidak memiliki hubungan timbal balik.

c. Hasil Uji Kausalitas Granger antara PDRB dengan Kemiskinan

   Berdasarkan uji kausalitas diatas, didapat bahwa antara PDRB dengan Kemiskinan, tidak terdapat hubungan kausalitas. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas yang lebih besar dari nilai α=5% dan juga nilai F-stat < F-Tabel.

**Analisis Hubungan Antara Kemiskinan dengan ADD, IPM dan PDRB Hubungan Antara ADD dengan Kemiskinan**

Merujuk pada teori kebijakan fiskal yang mengacu pada upaya pemerintah untuk menggunakan instrumen fiskal seperti pengeluaran dan pendapatan dalam mencapai sebuah tujuan khusus dalam suatu perekonomian. Tidak diragukan lagi, salah satu komponen instrumen tersebut adalah ADD, yang digunakan pemerintah sebagai alat fiskal untuk mencapai tujuan untuk mengurangi kemiskinan di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan timbal balik antara kemiskinan dan alokasi dana desa.

Berikut beberapa penjelasan mengapa alokasi dana desa dapat mempengaruhi kemiskinan, yakni:

1. ADD dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, dan lain-lain. Infrastruktur ini dapat meningkatkan akses desa terhadap sumber daya dan pasar, sehingga membuka peluang ekonomi baru dan mengurangi kemiskinan. Hal ini sesuai dari fungsi ADD yang dimana tujuannya dalam membiayai program desa yang tercantum pada surat Menteri Nomor: 140/690/SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang pedoman Alokasi Dana Desa dari pemerintah kabupaten /kota ke pemerintah desa, bahwasannya disini yang dimaksud untuk membiayai program desa dan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, bahwa maksud ADD adalah untuk membiayai pemerintah desa dalam menyelenggarakan program desa. Progam desa yang dimaksud adalah dalam membangun infrastruktur dalam desa (Saputra & Wahyuni, 2022).
2. Program-program yang didanai oleh ADD, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan

usaha kecil, atau bantuan modal, dapat membantu masyarakat desa untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas ekonominya. Hal ini memungkinkan mereka untuk memulai usaha baru atau meningkatkan pendapatan dari usaha yang sudah ada.

3. Selain itu, dana yang dialokasikan oleh desa dapat digunakan untuk meningkatkan akses terhadap layanan sosial dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan meningkatnya akses terhadap layanan-layanan ini, diharapkan kualitas hidup masyarakat desa akan meningkat, sehingga secara bertahap mengurangi tingkat kemiskinan.
4. Desa-desa yang miskin sering kali mengalami kekurangan infrastruktur dasar. Alokasi dana desa dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur yang sudah ada atau membangun infrastruktur baru, sehingga membantu mengurangi keterpurukan infrastruktur yang menjadi salah satu penyebab kemiskinan.

Sementara itu, kemiskinan mampu merubah alokasi dana desa didasari dengan beberapa alasan, sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat menjadi sebuah indikator bagi pemerintah setempat untuk mengalokasikan dana desa secara lebih prioritas dan efektif dan terutama melihat proses alokasi dana desa yang biasanya dikendalikan oleh pemerintah daerah atau lembaga tertentu yang memiliki kekuatan politik dan administratif. Mereka memiliki kontrol penuh atas alokasi dana desa dan dapat memastikan bahwa alokasi tersebut tetap berada dalam kendali mereka, terlepas dari perubahan tingkat kemiskinan.
2. Adanya tekanan dari masyarakat atau lembaga sosial untuk mengatasi kemiskinan dapat mempengaruhi kebijakan alokasi dana desa dengan memberikan prioritas pada program-program yang bertujuan mengurangi kemiskinan, serta kondisi kemiskinan yang tinggi juga dapat memicu pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya yang lebih besar ke daerah tersebut dalam upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah yang kaya dan miskin.
3. Kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan sering mengatur bagaimana dana desa didistribusikan. Perubahan dalam ADD biasanya memerlukan proses yang cukup panjang dan kompleks, yang tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan, tetapi juga oleh berbagai faktor politik, ekonomi, dan sosial lainnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinaga, AE (2023) yang menyatakan bahwa terkait dengan kualitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah saat menaikkan besaran ADD, ada banyak pertimbangan. Ini karena berbagai modus dan penyelewengan anggaran desa masih sering terjadi hingga saat ini, karena sulit untuk melakukan pengawasan yang efektif dan kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam transparansi pengelolaan dana desa. Ini menunjukkan bahwa aktor sosial dipengaruhi oleh banyak faktor politik.

**Hubungan antara IPM dengan Kemiskinan**

Dalam penelitian ini, menunjukkan bahwasanya tidak ditemukannya hubungan kausalitas antara IPM dengan Kemsikinan. Meksipun tidak ada hubungan kausalitas secara langsung, hal ini tidak berarti bahwa peningkatan IPM tidak memiliki dampak positif pada kesejahteraan masyarakat lewat kondisi jumlah penduduk miskin di Nias Utara. Peningkatan dalam beberapa aspek atau komponen yang membangun IPM dapat memberikan manfaat jangka panjang yang mungkin tidak langsung mengurangi kemiskinan, walaupun efek atau dampak nya secara tidak langsung terlihat dalam waktu yang singkat. IPM dan kemiskinan adalah dua konsep yang saling terkait tetapi memiliki fokus yang berbeda. IPM mengukur kemajuan suatu negara dalam tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Di sisi lain, kemiskinan biasanya diukur dengan tingkat

pendapatan, kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, atau keterbatasan akses terhadap sumber daya dan layanan.

IPM tidak mampu mempengaruhi kemiskinan dan sebaliknya, dilandasi dengan beberapa alasan, yakni:

1. IPM dan kemiskinan memiliki fokus yang berbeda dalam mengukur kesejahteraan. IPM berfokus pada aspek-aspek yang lebih luas dari kesejahteraan manusia, seperti pendidikan dan kesehatan, sementara kemiskinan lebih berfokus pada pendapatan yang rendah atau ketidakmampuan untuk mendapatkan akses ke kebutuhan dasar.
2. Meskipun IPM mencakup pendapatan riil per kapita sebagai salah satu komponennya, itu tidak secara langsung mengukur kemiskinan dalam arti tradisional. Kemiskinan sering diukur dengan menggunakan garis kemiskinan relatif atau absolut, yang menentukan batas minimum pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
3. IPM biasanya digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia di tingkat nasional atau regional yang lebih besar, sementara kemiskinan seringkali diukur pada tingkat individu atau rumah tangga. Oleh karena itu, sementara IPM memberikan gambaran umum tentang kesejahteraan suatu populasi, ukuran kemiskinan lebih terfokus pada individu atau kelompok yang secara langsung terpengaruh oleh kekurangan ekonomi.
4. Meskipun terdapat hubungan antara IPM dan kemiskinan, perubahan dalam IPM tidak selalu secara langsung mencerminkan perubahan dalam tingkat kemiskinan, dan sebaliknya. Misalnya, peningkatan dalam IPM mungkin tidak selalu menghasilkan pengurangan kemiskinan jika peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendidikan atau kesehatan, tanpa peningkatan yang signifikan dalam pendapatan riil per kapita.
5. Selain IPM, ada banyak faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, termasuk kebijakan ekonomi, distribusi pendapatan, akses terhadap pekerjaan yang layak, dan lain-lain. Akibatnya, kemiskinan ditentukan oleh banyak faktor selain tingkat pembangunan manusia.

Dengan demikian, meskipun IPM dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kemajuan suatu negara dalam aspek-aspek kesejahteraan manusia, itu tidak secara langsung mengukur atau mempengaruhi kemiskinan, dan sebaliknya. Kemiskinan juga tidak secara langsung mempengaruhi IPM, karena IPM lebih bersifat holistik dalam mengukur kesejahteraan manusia yang melampaui dimensi tunggal seperti kemiskinan.

**Hubungan antara PDRB dengan Kemiskinan**

PDRB adalah ukuran ekonomi suatu wilayah yang mencerminkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam wilayah tersebut dalam satu periode waktu tertentu. Kemiskinan, di sisi lain, mengacu pada kondisi di mana individu atau kelompok tidak memiliki akses terhadap sumber daya atau layanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hasil penelitian memberikan bukti bahwa tidak ada hubungan timbal balik atau pun hubungan searah antara PDRB dengan Kemiskinan. Hal ini jelas menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tercermin melalui PDRB tidak secara langsung memengaruhi kemiskinan di Kabupaten Nias Utara.

PDRB tidak mampu secara langsung memengaruhi kemiskinan, dan sebaliknya, dilandasi dengan beberapa alasan, yakni:

1. PDRB mengukur total produksi dalam suatu wilayah, tetapi tidak memberikan gambaran tentang distribusi pendapatan di dalam wilayah tersebut. Meskipun suatu wilayah mungkin memiliki PDRB yang tinggi, distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menyebabkan kemiskinan yang tinggi di antara sebagian penduduknya. Dengan kata lain, PDRB yang

tinggi tidak selalu berarti bahwa seluruh penduduk dalam wilayah tersebut hidup sejahtera.
2. Meskipun PDRB meningkat, tidak ada jaminan bahwa pendapatan tersebut akan didistribusikan secara merata di antara penduduk wilayah tersebut. Ketidaksetaraan pendapatan dapat menyebabkan sebagian penduduk tetap hidup dalam kemiskinan, meskipun PDRB meningkat.
3. Ada kemungkinan bahwa kemiskinan dalam suatu wilayah tidak terlihat secara langsung dalam data PDRB. Beberapa individu atau kelompok mungkin tidak dihitung dalam produksi ekonomi resmi, misalnya, pekerja informal atau masyarakat adat yang bergantung pada sumber daya alam tradisional. Oleh karena itu, peningkatan PDRB tidak selalu mencerminkan penurunan kemiskinan yang sebenarnya.
4. Faktor-faktor non-ekonomi seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan infrastruktur adalah penyebab utama kemiskinan. Meskipun PDRB yang tinggi dapat menciptakan peluang untuk meningkatkan akses terhadap sumber daya ini, faktor-faktor non-ekonomi ini juga memainkan peran penting dalam mengatasi kemiskinan.
5. Pengukuran PDRB dan kemiskinan memiliki metodologi dan kriteria yang berbeda, sehingga sulit untuk membuat hubungan langsung antara keduanya. PDRB mengukur aktivitas ekonomi, sementara kemiskinan mengukur kekurangan atau ketidakmampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Dengan demikian, meskipun terdapat keterkaitan antara PDRB dan kemiskinan, hubungan antara keduanya bersifat kompleks dan tidak selalu langsung. PDRB yang tinggi tidak menjamin pengurangan kemiskinan, dan sebaliknya, tingkat kemiskinan yang rendah juga tidak selalu menyebabkan peningkatan PDRB.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan Kausalitas Kemiskinan Nias Utara dengan Alokasi Dana Desa, Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto maka, dapat disimpulkan:

1. Terdapat hubungan kausalitas antara Alokasi Dana Desa dengan Kemiskinan di Nias Utara tahun 2010-2023.
2. Tidak terdapat hubungan kausalitas antara Indeks Pembangunan Manusia dengan Kemiskinan Nias Utara tahun 2010-2023.
3. Tidak terdapat hubungan kausalitas antara Produk Domestik Regional Bruto dengan Kemiskinan Nias Utara tahun 2010-2023.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang diberikan adalah:

1. Keputusan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan ADD di Indonesia sudah tepat, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian menunjukan bahwa semakin tinggi ADD di Indonesia dapat berdampak pada penurunan Kemiskinan. Sebaiknya langkah pemerintah Nias Utara selanjutnya berfokus untuk terus mendistribusikan ADD secara transparan dan tepat sasaran sehingga akan terus berdampak baik pada penurunan kemiskinan di Indonesia.
2. Pemerintah perlu memperhatikan pemerataan kualitas sumber daya manusia penduduknya, berdasarkan hasil penelitan menunjukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia, begitupun dengan Kemiskinan tidak mampu memengaruhi kualitas dari SDM di Nias Utara. Hal ini dikarenakan oleh cakupan IPM yang luas sehingga tidak langsung berdampak pada pengaruhnya terhadap kemiskinan.
3. Pemerintah perlu untuk memeratakan secara adil hasil manfaat dari pertumbuhan ekonomi seperti PDRB di berbagai sektor. Distribusi yang merata dan adil dari hasil PDRB akan

meningkatkan pembangunan di berbagai sektor dan mengurangi kemiskinan di Indonesia.

4. Dari hasil penelitian, jika Pemerintah dengan harapan ingin cepat mengurangi kemiskinan, Pemeintah harus lebih berfokus pada Government Expenditure melalui ADD, karena IPM, dan PDRB tidak serta merta dapat memberikan pengaruh secara langsung terhadap Kemiskinan.
5. Karena keterbatasan data, penelitian ini memerlukan tambahan sampel data untuk penelitian selanjutnya, sehingga bisa didapatkan hasil pengujian model yang lebih baik untuk bisa dibandingkan dengan penelitian ini.

## DAFTAR REFERENSI

Addae-Korankye, A. (2014). Causes of poverty in Africa: A review ofliterature. American International Journal of Social Science, 3(7), 148.

Ajija, Shochrul Rohmatul, dkk. 2011. Cara Cerdas Menguasai Eviews. Jakarta: Salemba Empat

Akbar, A. M. (2023). Hubungan Kausalitas Produk Dsomestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan di Indonesia. Independent: Journal of Economics, 3(1), 141.

Anonim, (2023). Mensos: Kawasan 3T Jadi Lokasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem. Diakses dari https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/mensoskawasan-3t-jadi-lokasi-penanganan-kemiskinan-ekstrem. (7 Februari 2024)

Ardianto, T. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2013 (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

Aziz, N. (2006). Analisis Ekonomi Alternatif Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Tesis Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor. 105 hlm.

Badan Pusat Statistik Indonesia. (17 Juli 2023). Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah. Diakses dari https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkyIzI%3D/persentasependuduk-miskin--p0--menurut-provinsi-dan-daerah.html. (20 Februari 2024)

Badan Pusat Statistik Nias Utara. (2023). Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha. Diakses dari https://niasutarakab.bps.go.id/indicator/52/41/4/laju-pertumbuhanpdrb-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-lapangan-usaha.html. (25 Januari 2024).

Danoedoro, P. (2009). Land-use Information from the Satellite Imagery: Versatility and Contents for Local Physical Planning. Lambert Academic Publishing AG & Co. KG.

Dondo, T. C., Benu, N. M., & Manginsela, E. P. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Minahasa. Journal of Agribusiness and Rural Development (Jurnal Agribisnis dan Pengembangan Pedesaan), 1(2), 60.

Ginting, A. M., & Rasbin, R. (2010). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia sebelum dan setelah krisis. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 1(2), 289.

Gujarati, Damodar, N & Porter, Dawn, C. 2012. Dasar-Dasar Ekonometrika. Buku 2, Edisi 5. Terj: Mangunsong. Jakarta : Salemba Empat.

Itang, I. (2015). Faktor Faktor Penyebab Kemiskinan. Tazkiya, 16(01), 7.

Kristanto D. 2014. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Brebes Tahun 1997-2012.

[skripsi]. Semarang (ID): Universitas Diponegoro.
Kuncoro, M. 2000. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mandra, (2023, 17 Agustus). Pemerintah Minta Dana Desa Digunakan Secara Tepat Sasaran. Di akses dari https://www.rri.co.id/sulawesi-tengah/nasional/323610/pemerintah-mintadana-desa-digunakan-secara-tepat-sasaran. (25 Januari 2024)
Mankiw N, Gregory, dkk. (2013). Pengantar ekonomi makro. Salemba Empat: Jakarta.
Nababan, A. A. (2020). Analisis Pengaruh Belanja Daerah, Jumlah Pengangguran, Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2006-2017. Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas HKBP Nommensen Medan.
Permatasari, V. B. D. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2012-2017. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 7(2).
Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI. (2015). Efektifitas Dana Desa. Analisis Ringkas Cepat (ARC). Diakses dari https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-ringkas-cepat/public-file/analisisringkas-cepat-public-33.pdf.. (24 Februari 2024).
Saputra, H. C. P., & Wahyuni, S. (2022). Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Pandu Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Public Sphere Review, 9.
Sukartini, N. M., & Saleh, S. (2012). Pengujian Hukum Wagner Dalam Perekonomian Indonesia Kajian Pengeluaran Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Provinsi. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 19(1).
Widyastuti, I. (2024, 25 Januari). Infrastruktur Jadi Penyebab Rendahnya Pendapatan di Kepulauan Nias. Diakses dari https://www.rri.co.id/daerah/530764/infrastruktur-jadi-penyebabrendahnya-pendapatan-di-kepulauan-nias. (29 januari 2024).
World Bank (2005) African Development Indicators 2005. New York :Oxford University Press.
Zain, A. L. (2022). Analisis Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 10 Kabupaten Di Jawa Tengah Periode Tahun 2016-2020.